






**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ASLI DANA MANDIRI**

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA (GCG)
PERIODE TAHUN 2020**

 [bprasidanamandiri](#)

 bprasidanamandiri@gmail.com

 [BPR Asli Dana Mandiri](#)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2020	
I. PENJELASAN UMUM	1
A. Referensi	2
B. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	2
C. Struktur Tata Kelola	2
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	4
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	4
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	7
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	7
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.....	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	8
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.....	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	9
F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	9
1. Paket / Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9
2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	9
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun.....	10
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	10
I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	11
J. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	11
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	11
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik,	11
III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA & KESIMPULAN UMUM	12
IV. PENUTUP	14

BAB I PENJELASAN UMUM

PT. BPR Asli Dana Mandiri menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR untuk menjadi Bank yang dikenal profesional, terpercaya dengan kinerja dan layanan prima.
2. Mendukung misi BPR :
 - Menciptakan jasa perbankan yang prima, mudah diakses dengan prinsip profesionalitas dalam pengelolaan dan pelayanan.
 - Meningkatkan pelaksanaan kepatuhan dan membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
 - Membangun dan menjaga sinergi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
 - Menuju terwujudnya Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dan berkembang, berorientasi *profit*, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham (*shareholder*) dan segenap karyawan, rekanan kerja serta nasabah (*stakeholder*) melalui kegiatan operasional.
 - Meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR.

Prinsip pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam melaksanakan kegiatan usaha senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Bank mengungkapkan dan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh masyarakat. Prinsip transparansi yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam pengelolaan Bank merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja Bank yang berkesinambungan. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran organisasi dalam hal menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran bisnis, strategi Bank dan memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Pertanggungjawaban diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Bank berusaha dan menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang termasuk dalam prinsip Independensi. Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dan campur tangan pihak eksternal.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan *Stakeholders*, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Penerapan prinsip Tata Kelola tersebut terwujud dari interaksi seluruh organ Perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta seluruh karyawan untuk menciptakan budaya Perusahaan yang berdasarkan kode etik, visi dan misi Bank dan juga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, kepercayaan publik dan menjamin terciptanya sistem perbankan yang sehat.

A. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
7. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
8. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.
9. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

B. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).

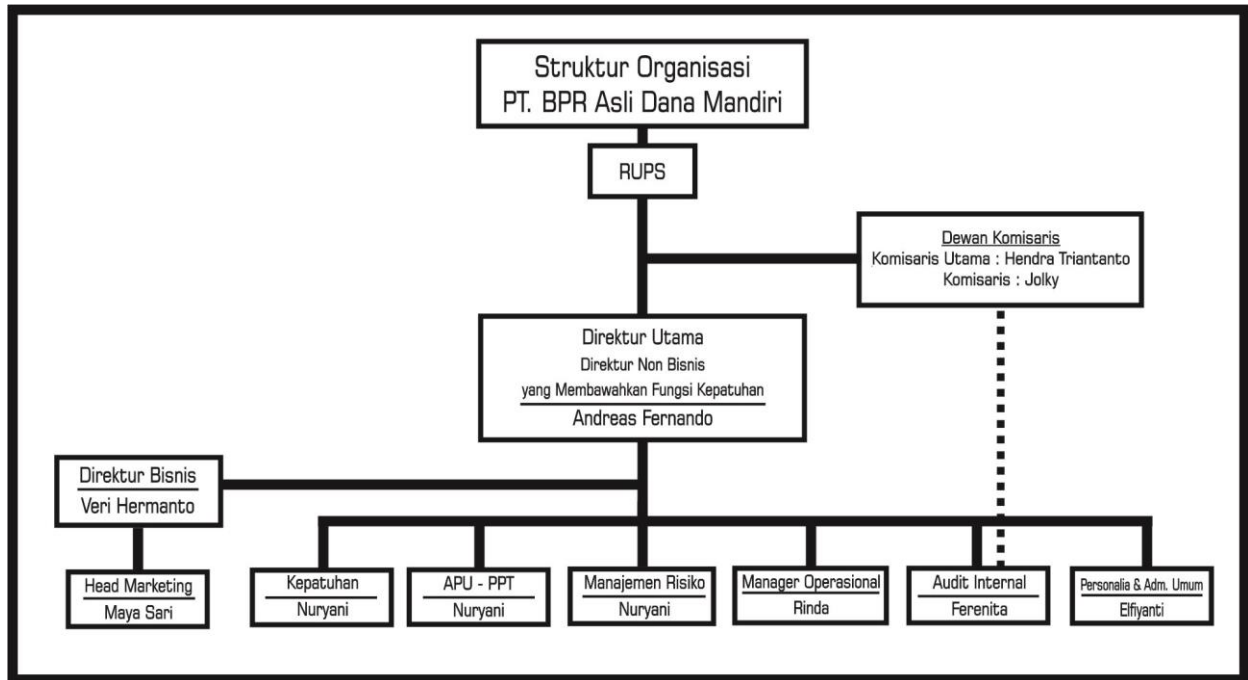
C. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* di PT. BPR Asli Dana Mandiri mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "*check balance*" dan pelaksanaan pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif

Berikut struktur Organisasi PT. BPR Asli Dana Mandiri :



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Andreas Fernando</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. - Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional - Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah operasional BPR; - Membawahkan fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko dan APU-PPT; - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. - Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. - Tidak menangani penyaluran dana. - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2	Nama : Veri Hermanto
	Jabatan : Direktur
<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. - Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional - Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah operasional BPR; - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. - Menangani penyaluran dana dan mengendalikan upaya peningkatan volume usaha; - Memberikan persetujuan pinjaman bersama komite kredit sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi; - Mengoptimalkan pencapaian tingkat kesehatan Bank yang sehat secara wajar; 	
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Direktur Bisnis telah membuka peluang bisnis pada pembelian kendaraan bermotor dengan melakukan kerja sama dengan showroom mobil di Tanjungpinang & Bintan. 2 Direktur Bisnis sudah menjalankan himbuan dari Dewan Komisaris dalam proses penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. 3 Direksi sudah menyusun strategi bisnis dalam rangka merealisasi rencana kerja bisnis tahun 2020. 4 Pengimbangan antara jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran agar rasio BOPO tercapai sudah dilakukan oleh Direksi. 5 <i>Head Marketing</i> dan <i>Collector</i> sudah diarahkan oleh Direksi untuk melakukan penagihan namun hasilnya masih belum cukup maksimal sehingga tingkat rasio NPL masih tinggi. 6 Direksi sudah melaksanakan kebijakan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penerapan stimulus perekonomian nasional untuk debitur-debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. 7 Direksi sudah mengarahkan <i>Head Marketing</i> dan <i>Collector</i> untuk rutin memantau jadwal pembayaran angsuran semua debitur terutama debitur yang melakukan restrukturisasi dan debitur bermasalah. 8 Info penjualan AYDA sudah aktif dibagikan melalui sosial media. PT. BPR Asli Dana Mandiri juga menyediakan fasilitas kredit KPR bagi nasabah yang berminat untuk membeli agunan AYDA dengan memberikan keringanan suku bunga kredit dan/atau biaya akad kredit. 9 Direksi sudah cukup aktif dalam melakukan pengawasan terhadap TPPU dan TPPT terutama terhadap nasabah PEP. PE APU-PPT rutin mengkinikan daftar DTTOT & PSPM dan memantau melalui laporan internal BPR terkait penerapan APU-PPT. 	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : Hendra Triantanto</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank yang dijalankan oleh Direksi; - Mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; - Mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank; - Melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada da Otoritas Jasa Keuangan; - Melakukan rapat evaluasi dengan Direksi; - Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Direksi tidak hadir; - Wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun.
2	<p>Nama : Jolky</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank yang dijalankan oleh Direksi; - mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; - mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank; - melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; - melakukan rapat evaluasi dengan Direksi; - memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Direksi tidak hadir; - wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghimbau kepada Direksi agar lebih fokus dalam mendorong dan mengedukasi serta memberikan pengarahan kepada tim Bisnis agar dapat lebih aktif mengembangkan relasi bisnis, serta peluang bisnis yang masih ada. - Menghimbau kepada Direksi untuk lebih selektif dan lebih teliti dalam menganalisa & memperhatikan risiko kredit pada saat melaksanakan pemberian kredit agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan menerapkan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian. - Direksi diharapkan dapat aktif dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek dan menengah agar rencana bisnis yang dibuat bisa terealisasi. - Direksi diharapkan bisa seefisien mungkin mengimbangi antara jumlah pendapatan dan pengeluaran agar rasio BOPO dapat tercapai sesuai dengan rencana bisnis. - BPR dapat lebih aktif dalam melakukan penagihan terhadap debitur-debitur yang mulai menunggak dan bermasalah serta memantau penyebab dan mencari <i>win-win solution</i> secara kekeluargaan sehingga NPL dapat turun sesuai dengan yang direncanakan. - BPR diharapkan dapat menerapkan kebijakan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung stimulus perekonomian nasional untuk debitur-debitur yang terkena dampak

penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), yang mana meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit.

- BPR dihimbau untuk tetap memantau pembayaran angsuran debitur sesuai dengan jadwal restrukturisasi agar jangan sampai terjadi wanprestasi yang mengakibatkan debitur macet dan peningkatan NPL.
- BPR diharapkan selalu aktif dalam penjualan AYDA dengan melalui sosial media dan jasa *property* yang tersedia.
- BPR diharapkan bisa meningkatkan *awareness* terkait kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT sebagai dampak dari krisis COVID-19.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Modal inti PT. BPR Asli Dana Mandiri per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.147.229.964,-, sesuai ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Andreas Fernando	0	0
2	Veri Hemanto	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Andreas Fernando	-	-	0
2	Veri Hemanto	-	-	0

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Andreas Fernando	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Veri Hermanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Andreas Fernando	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Veri Hermanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hendra Triantanto	0	0
2	Jolky	3,000,000,000	30

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hendra Triantanto	-	-	0
2	Jolky	-	CV. Asli Motor	30
		-	PT. Asli Gadai Sejahtera	20
		-	Asli Mart	50

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Hendra Triantanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jolky	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Hendra Triantanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jolky	Tidak Ada	Tidak Ada	Jolly - Abang Kandung, Jolphy - Abang Kandung

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	605.145.000	2	313.764.000
2	Tunjangan	2	42.900.000	2	22.800.000
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
Total			648.045.000		336.564.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	1 unit Rumah Dinas (1 orang)
2	Transportasi	2 unit Mobil Dinas (2 orang)	1 unit Mobil Dinas (1 orang)
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya *)	Biaya pembuatan kacamata	Biaya pembuatan kacamata

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,3	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,4	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,3	:	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	30 Januari 2020	2 (dua) orang	Realisasi Kinerja dan Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2019
2	15 Mei 2020	2 (dua) orang	Realisasi Kinerja PT. BPR Asli Dana Mandiri per Maret 2020
3	03 Agustus 2020	2 (dua) orang	Realisasi Kinerja PT. BPR Asli Dana Mandiri per Juni 2020
4	21 Oktober 2020	2 (dua) orang	Realisasi Kinerja PT. BPR Asli Dana Mandiri per September 2020

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Hendra Triantanto	2 (dua)	2 (dua)	100%
2	Jolky	2 (dua)	2 (dua)	100%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil	
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil	

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2020, PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2020, PT BPR Asli Dana Mandiri tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA & KESIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku, pada tahun 2020 PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melakukan *self assessment* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat & Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penilaian *Self Assessment* tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi Kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi Audit Intern;
- 7) Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Batas maksimum pemberian kredit;
- 10) Rencana bisnis BPR; dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar **2.68** dengan peringkat **CUKUP BAIK** dan disimpulkan bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 11 faktor penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*). Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek, yaitu :

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Terdapat beberapa kelebihan dan/atau kelemahan pada aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, antara lain :

Kelebihan

1. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
3. Rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan BPR telah dituangkan dalam Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri dimana rencana strategis tersebut berjalan sesuai dengan visi, misi Bank dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta didukung oleh Pemegang Saham.

Kelemahan

Belum terdapat kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.

B. Proses Penerapan Tata Kelola

Kelebihan

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan cukup optimal dan independen.
2. PT. BPR Asli Dana Mandiri telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP Indarto Waluyo untuk periode tahun 2020 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan RUPS. Di samping itu, akan dilaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Asli Dana Mandiri kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK maupun peraturan perundang-undangan.
4. Penyusunan Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

Kelemahan

1. Terdapat beberapa *point* dalam Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri yang tidak tercapai sesuai dengan proyeksi Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2020 berhubungan adanya pandemi COVID-19.
2. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko masih belum berjalan dengan maksimal.
3. Analisa dalam pemberian kredit masih harus ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2020 ini kami susun dan sampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami sadari bahwa tahun 2020 masih terdapat banyak kekurangan & kelemahan dan akan kami perbaiki untuk ke depannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Tanjungpinang, 19 Mei 2021

PT. BPR Asli Dana Mandiri,



Hendra Triantanto
Komisaris Utama




Andreas Fernando
Direktur Utama
Direktur Yang Membawahi
Fungsi Kepatuhan